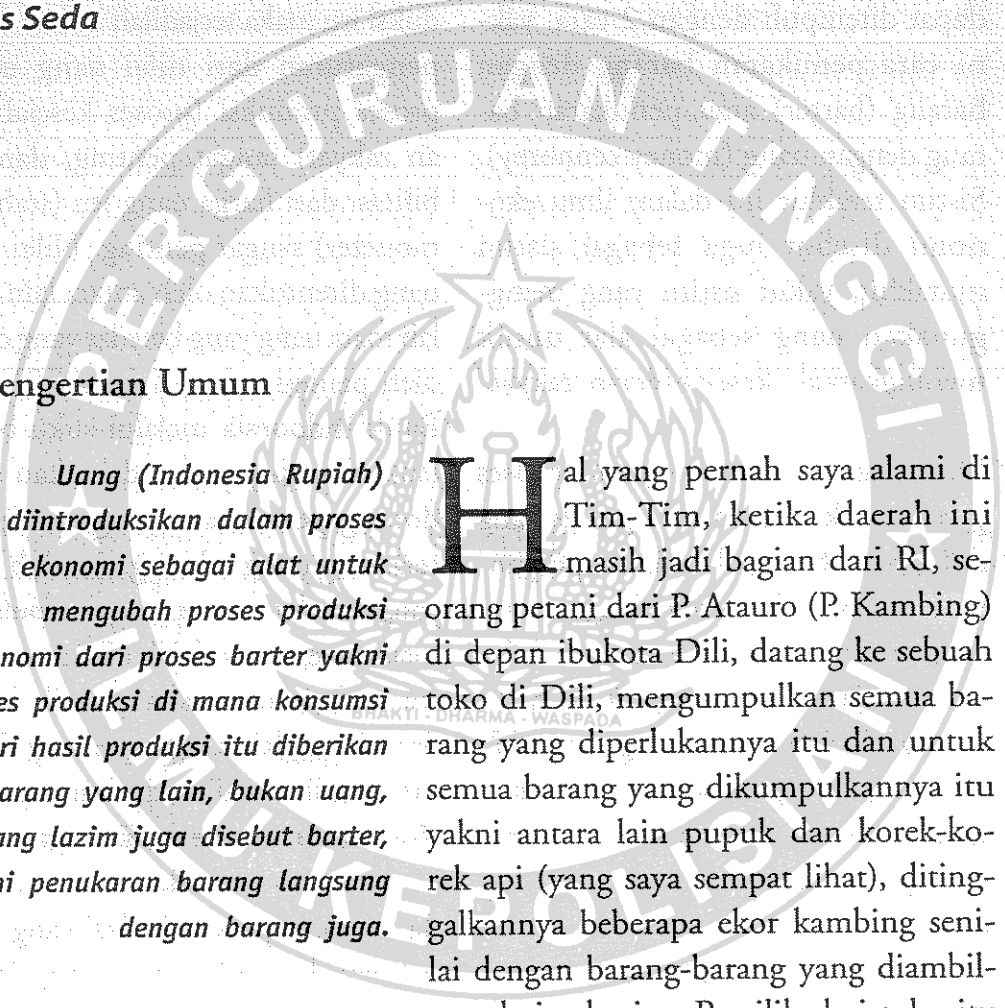


Uang Negara RI: Dulu, Kini dan Ke Depan

Frans Seda



I. Pengertian Umum

Uang (Indonesia Rupiah) diintroduksikan dalam proses ekonomi sebagai alat untuk mengubah proses produksi ekonomi dari proses barter yakni proses produksi di mana konsumsi dari hasil produksi itu diberikan barang yang lain, bukan uang, yang lazim juga disebut barter, yakni penukaran barang langsung dengan barang juga.

Hal yang pernah saya alami di Tim-Tim, ketika daerah ini masih jadi bagian dari RI, seorang petani dari P. Atauro (P. Kambing) di depan ibukota Dili, datang ke sebuah toko di Dili, mengumpulkan semua barang yang diperlukannya itu dan untuk semua barang yang dikumpulkannya itu yakni antara lain pupuk dan korek-korek api (yang saya sempat lihat), ditinggalkannya beberapa ekor kambing senilai dengan barang-barang yang diambilnya dari toko itu. Pemilik dari toko itu berteriak: "maling". Polisi pun datang dan menangkap petani itu dan petani asal Atauro itu marah. Ia mengatakan bagaimana saya mencuri, saya meninggalkan beberapa ekor kambing senilai dengan

barang-barang yang saya ambil. Petani ini masih berada dalam alam sistim ekonomi barter.

Jadi sebuah proses ekonomi atau proses mencapai kesejahteraan rakyat dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni cara penukaran barang dengan barang (barter) atau penukaran barang dengan uang (money economy). Sistim terakhir ini dalam ilmu ekonomi disebut juga sebagai sistim mutakhir, yakni sistim yang menggunakan uang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikianlah sekilas sejarah proses produksi ekonomi yakni proses yang dulu pernah terjadi, kini diperpanjang proses itu ke depan dengan uang yang menentukan proses dari produksi itu (kesejahteraan daripada rakyat). Ini juga disebut bahwa uang yang telah memperpanjang proses produksi (atau uang telah melaksanakan "*productie omweg*") dengan menukarkan uang dengan produksi untuk konsumsinya dan si penerima uang menanamkannya kembali dalam proses produksi ("*productie omweg*") pada taraf yang berikutnya. Dengan demikian terintroduksikan pula dalam proses ekonomi (proses kesejahteraan rakyat) bahwa nilai uang turut menentukan

nilai dari proses produksi itu. Bayangkanlah dalam tahap yang ke-2 itu jika nilai uang lebih rendah dari barang yang dihasilkan sehingga terjadi Deflasi. Dan jika terjadi nilai uang lebih tinggi dari barang yang diproduksi itu maka terjadilah inflasi. Maka pengaturan dari nilai uang untuk proses produksi (proses kesejahteraan rakyat) sangat penting, dan stabilisasi dari harga uang itu (stabilitas moneter) sangat penting. Nilai mata uang ditentukan oleh antara lain jumlah mata uang yang beredar yang diatur oleh pemerintah melalui APBN dan Bank Indonesia melalui suku bunga (suku bunga yang rendah akan mendorong permintaan yang meningkat terhadap uang sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat pula dan makin merosot pulalah nilai mata uang itu. Sebab itu maka politik bunga dari BI adalah sangat penting dalam menentukan nilai dari mata uang Rupiah itu. Pemerintah juga berperan demikian melalui Defisit APBN dapat menciptakan Inflasi yang turut menentukan nilai mata uang itu).

Tahun 1964 pada awal ORBA, Inflasi ditimbulkan oleh banyaknya uang dalam peredaran yang disebabkan oleh defisit Negara sejak tahun 1950-an yakni sejak Indonesia merdeka.

Pemerintahan dirobah setiap 3 bulan sekali. manajemen keuangan kacau dan masing-masing departemen mempunyai kewenangannya sendiri dalam hal keuangannya.

Sejak saya menjadi Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Suharto, saya mulai menertibkan dengan mengeluarkan peraturan bahwa pengelolaan keuangan berada di satu tangan yakni di tangan Presiden RI. Tentang penentuan itu dapat dibaca dalam buku kenangan saya sebagai Pejabat Negara di Departemen Keuangan.

Saya masih teringat sekali ketika Prof. Dr. Schacht dari Jerman dan Prof. Tilbergen dari Belanda datang ke Presiden Soekarno dan menyatakan bahwa Inflasi harus distop karena terlalu tinggi. Presiden Soekarno memanggil saya dan menanyakan kepada saya, berapa sih tingginya Inflasi itu. Waktu itu di tahun '60-an baru 310%, di tahun '65 bulan Juni sebesar 650%. Saya bilang kepada Bung Karno bahwa 310% memang terlalu tinggi. Lalu Bung Karno menjawab kepada mereka berdua, kami adalah bangsa yang besar dan kami bermain dengan angka-angka

flasi. Saya sebagai ekonom tidak menyetujui ucapan itu tetapi karena Bung Karno menjawabnya kepada pihak asing maka saya diam saja.

Seperti telah dikatakan, ketika saya menjadi Menteri Keuangan dalam bulan Juni 1965, angka inflasi adalah 650% sehingga Indonesia ditimpa oleh apa yang dinamakan "*hyper-inflation*".

Selanjutnya dapat dibaca dari tulisan saya dalam Buku Kenangan di Departemen Keuangan. Saya juga masih sangat teringat, kejadian bahwa untuk pertama kali dalam sejarah RI terjadi "*balanced budget*" di tahun 1968.

Seperti dikatakan dalam artikel itu, saya menertibkan "*hyper-inflation*" Indonesia dengan 2 cara yakni pertama : menghilangkan Defisit Negara dengan cara "*single management*" keuangan Negara di tangan Presiden RI sesuai dengan Prinsip Presidensiil dari Pemerintahan RI cq. Menteri Keuangan atas nama Presiden, dan kedua : meningkatkan pendapatan Negara melalui peningkatan Pajak dan lain-lain pendapatan Negara.

Ini yang dilakukan di tahun 1968 yak-

ni peningkatan pengeluaran Negara diimbangi dengan peningkatan pendapatan Negara dengan jumlah yang sama, sehingga secara kuantitatif dan kualitatif terdapat keseimbangan keuangan Negara dan Belanja Negara.

Jadi penertiban dari Inflasi bukan melalui jumlah uang yang diatur oleh Bank Indonesia tetapi dengan peningkatan pendapatan Negara yang dihasilkan oleh "single management" itu melalui penertiban dari Defisit Negara.

Di tahun 1966, ketika saya menjadi Menteri Keuangan, terdapat situasi dan kondisi keuangan Negara sebagai berikut : (*lihat artikel untuk Dep. Keuangan*)

II. Uang Rupiah: Sekarang & Ke Depan

Sekarang yang diperlukan adalah pengembangan di sektor riil adalah (sektor produksi, sektor perdagangan dan sektor investasi). Pembangunan masyarakat desa (infrastruktur pedesaan) dan suatu kebijakan yang secara pro-aktif akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam sistem produksi dan dalam karya serta hidup

bersama di pedesaan dan di sektor petani. Cara karya dan hidup bersama dan pola produksi yang ditimbulkan oleh pengembangan masyarakat desa dan kebijakan-kebijakan yang secara aktif pro-petani itu adalah antara lain adanya kelebihan tenaga kerja di pedesaan dan pertanian yang memerlukan pengorganisasian yang baru dari tenaga yang berlebihan itu dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah ini sebaiknya disusun dalam bentuk koperasi dan mereka inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah dan bank-bank pemerintah, melalui cara perkreditan dengan suku bunga yang rendah.

Dengan demikian saya membedakan antara UKM yang berada sebelum adanya kebijakan pembangunan masyarakat desa itu (infrastruktur pedesaan dan kebijakan yang secara aktif pro-petani) dengan yang datang sesudah adanya kebijakan-kebijakan itu. Yang berada sebelum adanya kebijakan itu boleh dibantu sepanjang mereka menunjang koperasi-koperasi dari UKM yang baru itu.

Hanya dengan kebijakan yang demikian itu maka risiko gangguan terhadap stabilitas moneter dapat diha-

dapi secara konsekwen dan kontinyu. Ini semua dalam rangka pemberantasan pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat desa dan petani.

Ke depan kita harus berani melakukan pendobrakan itu. Menurut saya ketakutan-ketakutan itu tidak beralasan selama kita berpegang pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas moneter sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

III. Beberapa Kapita Selekt yang Turut Mempengaruhi Stabilitas Moneter yang Ingin Kita Capai dan Pertahankan itu.

A. Mengenai Tugas-Tugas Konstitusional dari Negara dan Otonomi Daerah

Dalam Preambule UUD-45 dikatakan bahwa setelah bangsa ini merdeka dan NKRI dibentuk maka tugas kita bersama adalah membentuk suatu pemerintahan dengan Sistem Presidensiil yang melakukan tugas-tugas konstitusional sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan Bangsa dan

Negara

2. Mengatasi percekocokan-percekocokan yang ada di kalangan bangsa di seluruh tanah air
3. Mensejahterakan rakyatnya
4. Mencerdaskan bangsanya
5. Turut menata dunia berdasarkan perdamaian TAMPAN L'Exploitation de l'ome par l'ome. Semua ini berdasarkan Pancasila dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Maka seluruh keuangan yang ada dalam APBN dan APBD harus diarahkan untuk tugas-tugas konstitusional dari pemerintahan itu. Di sini letak masalah Otonomi Daerah.

Karena Kebangsaan kita berdasarkan pada religiositas dan pluralisme, maka pada dasarnya semua daerah adalah Otonom. Kita tidak mengenal desentralisasi ala Belanda. Bedanya adalah bahwa NKRI berdasarkan kebangsaan yang religius dan pluralis itu disusun dari bawah dengan mengikutsertakan semua religi yang ada di Indonesia tanpa menjadi Negara Agama, mengikutsertakan semua budaya dari suku-suku yang ada di Indonesia (dari Sabang sampai Merauke) tanpa menjadi Negara Federal. Sementara Negara Kesatuan Belanda bagi-

an-bagiannya dibentuk dari atas melalui desentralisasi (walaupun dalam sejarah perjuangan kita pernah mengenal pengertian negara Indonesia Serikat, namun hal itu diterima oleh para pemimpin perjuangan kita Soekarno-Hatta sebagai taktik belaka yang diusulkan oleh Sutan Sahrir seorang pemuda pejuang yang oleh

Soekarno-Hatta di jadikan perdana menteri RI. Taktik perjuangan yang dimaksud adalah persetujuan perundingan dengan Belanda penjajah kita untuk memperoleh pengakuan oleh Belanda bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa melalui KMB di Den Haag 1949. Sekali persetujuan diperoleh dari pihak Belanda melalui KMB itu maka RIS dibubarkan pun demikian dengan Uni Indonesia Belanda. Dengan demikian dengan perjuangan kita kemenangan bangsa Indonesia didasarkan pada perjuangan bersenjata dan diplomasi. Salah seorang tokoh pembantu Sutan Sahrir adalah Dr. Ida Anak Agung Gde Agung raja Gianyar di pulau Bali dan Perdana Menteri Indonesia Timur.

Dan kembali kepada masalah keuangan Negara seperti yang dikatakan tadi dan dalam tata susunan Indonesia yang dibentuk dari bawah itu maka

semua daerah adalah daerah otonom, hanya fungsinya berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain.

Ada Otonomi yang berfungsi secara mendasar (OTDAS), ada Otonomi yang berfungsi sebagai madya (OTMAD), dan Otonomi yang berfungsi secara penuh (OTPEN). Dalam kondisi OTDAS maka walaupun daerah itu otonom, maka dari segi keuangannya ia dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat dan seluruh kekayaannya diserahkan ke pemerintah pusat.

Dalam sikon OTMAD maka 50% dipenuhi oleh pemerintah pusat dan semua kekayaan daerah 50% diserahkan ke pemerintah pusat. Dan dalam OTPEN seluruh pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dan pemerintah pusat sebagai pengawas yang efisien dan efektif, sehingga dalam hal ini tidak ada pengertian perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pengertian perimbangan keuangan itu timbul dari adanya pengertian desentralisasi yang dioper dari ilmu Indologi Belanda yang menyamakan struktur kesatuan Belanda sama dengan struktur Kesatuan RI, yang dibantah dalam tulisan ini. Semua uang sebagai sumber dari APBN/APBD adalah

atau dari pusat atau dari daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah secara bebas setiap tahun dapat memilih posisi masing-masing dalam bidang keuangan dan otonomi daerah. Daerah yang tadinya dengan sikon OTDAS di tahun berikutnya dapat meningkat menjadi OTMAD. Dan daerah yang tadinya OTMAD dapat menjadi OTPEN. Adapun daerah yang sudah menjadi OTPEN tidak bisa meningkatkan posisinya kecuali kita mengubah menjadi Negara Serikat, maka peningkatannya melalui perluasan pembiayaan dari hasil kekayaan sendiri dengan pembiayaan luar negeri dan investasi asing di bawah pengawasan yang efisien dan efektif dari pemerintah pusat.

Hanya ada beberapa syarat keuangan dalam pengaturan perekonomian ME

1. Daerah-daerah tidak boleh melakukan defisit. Yang boleh mengadakan defisit adalah pemerintahan pusat yang dibiayai dari bantuan luar negeri. Oleh karena itu hanya pemerintah pusat yang boleh mengadakan pinjaman dan investasi luar negeri.

2. Hal ini supaya dipegang teguh pemerintah pusat selama kita masih merupakan NKRI.

B. Mengenai apa yang dinamakan Kekayaan Bung Karno

Harta dari Bung Karno berawal pada permintaan dunia kepada Pemerintah AS untuk mengoper sistim standar emas dan keuangan internasional dari Inggris dengan poundsterlingnya. Namun AS tidak menyetujui hal itu, maka timbullah beberapa preposisi sebagai berikut:

- a. AS memerlukan bantuan dari negara berkembang dan Indonesia pada waktu itu berfungsi sebagai pemimpin dari negara berkembang itu, dan AS melalui Presiden Kennedy di tahun 1963 (pada kunjungan Presiden RI ke Washington) menawarkan hal itu pada Presiden Soekarno dalam bentuk apa yang dinamakan "Green Hilton Agreement". Dalam Agreement itu beberapa ribu ton emas ditawarkan kepada Presiden Soekarno sebagai pemimpin dari Negara berkembang yang merupakan awal dari kekayaan Bung Karno yang diedarkan itu.

- b) Hal ini dibumbui dengan tambahan cerita-cerita mengenai adanya kekayaan-kekayaan raja-raja se-Nusantara yang diserahkan kepada Bung Karno, adanya Dollar Brazilia dan adanya kekayaan yang diserahkan oleh Gereja Katolik sedunia yang diserahkan oleh Paus Yohannes ke-23 pada Bung Karno pada waktu kunjungan Bung Karno ke Vatikan tahun 1963 itu. (yang diserahkan oleh Paus Yohannes ke-23 kepada Bung Karno katanya pembagian setiap tahun dari Gereja Katolik kepada 2 Schisma yang besar di kalangan kaum Kristiani yakni pemisahan Gereja Ortodoks Greek dan Rusia dari Gereja Katolik pada abad pertengahan, dan pemisahan dari Gereja Anglikan (Inggris) dari Gereja Katolik sedunia di awal abad industrialisasi dunia (di Inggris yang berkuasa pada waktu itu Raja Henry ke-8 yang memisahkan diri dari Gereja Katolik karena keinginannya untuk bercerai ditolak oleh Paus). Semua ini dalam bentuk dokumen-dokumen yang katanya dijamin oleh Bank Swiss, sebuah Negara yang melambangkan kekuatan perbankan dunia.
- c) Mengenai Bung Karno ada cerita yang beredar, yang menyatakan bahwa Bung Karno menyerahkan hal ini kepada 9 orang, dan masing-masing dari orang ini mendirikan Yayasan Pembangunan yang dokumen-dokumennya pun beredar, Bung Karno katanya pernah mengeluarkan pernyataan bahwa semua emas-emas ini adalah warisan bagi rakyat Indonesia dan bukan bagi keluarganya.
- d) Saya dengan sengaja mengemukakan cerita-cerita ini sebab hal-hal ini semua sedang beredar dalam masyarakat luas, sampai-sampai ada yang datang kepada saya dengan dokumen-dokumen ash dan ada pula yang datang ke Bank Swiss di Zurich dan ditangkap oleh polisi Swiss dan dijebloskan ke penjara karena membawa dokumen palsu. Memang bank-bank Swiss tidak mengakui dokumen-dokumen itu sebab bila mengakui keabsahan dari dokumen itu sekali ia mengakui dari keabsahan dari dokumen itu maka ia bisa bangkrut. Demikian sekilas riwayat mengenai harta dari Bung Karno yang beredar antara kenyataan dan dongeng-dongeng dibumbui lagi oleh mistik yang menghinggapinya.

C. Uang Plastik Merah 100 ribu yang dicetak di Australia

Sepanjang yang saya ketahui, uang ini berasal dari rencana "*hengky pengky*" untuk menetapkan kurs Rupiah tetap yang pasti terhadap dollar pada Rp. 5.000 per dollar AS (pada waktu itu kurs dollar sekitar Rp. 12.000 per dollar AS di bawah pemerintahan Suharto). Untuk keperluan *hengky pengky* kurs rupiah itu pada dollar AS diperlukan jaminan baik dalam \$ US maupun dalam Rupiah. Jaminan dalam bentuk \$ US itu adalah melalui pinjaman pada Taiwan dengan memberikan fasilitas kepada Taiwan oleh Presiden Suharto untuk memiliki lahan di Kalimantan Timur. Untuk keperluan jaminan Rupiah maka Rupiah perlu dicetak tambah, yang dipesan dari Australia (uang Rp. 100 ribu plastik merah itu). Rencana "*hengky pengky*" ini tidak disetujui oleh RI (antara lain saya diminta melalui Sdr. Peter Gontha untuk menyetujui proyek ini, namun saya menolaknya tetapi uang jaminan Rupiah itu sudah sempat dicetak dan disimpan dalam bunker-bunker yang berada di Jawa Tengah, Singapura, Australia, katanya. Uang yang telah dicetak ini yang belum secara legal

dapat diedarkan dalam masyarakat sekarang ingin diedarkan melalui pemberian-pemberian kredit-kredit kepada petani, nelayan, buruh. Jika ini terjadi maka timbullah inflasi besar-besaran, hal ini harus dicegah. Saya tidak menyetujui desakan sementara orang pada Pemerintah dan BI dengan "MOM" perkreditan itu. Ini sekedar apa yang beredar dalam masyarakat dewasa ini.

D. I. Mengenai Inflasi

Dewasa ini terdapat suatu krisis mengenai inflasi itu secara kuantitatif maka inflasi terus menerus menurun tiap tahun (lihat laporan BPS) namun secara kualitatif inflasi terus menerus meningkat dilihat dari sikon bahwa defisit terus menerus meningkat, sementara tingkat suku bunga terus diturunkan yang berarti bahwa uang rupiah dalam peredaran bertambah yang berarti inflasi bertambah pula.

Hal ini dapat dilihat dari harga bahan pokok/keperluan hidup sehari-hari yang terus meningkat. Kita dapat menyimpulkan bahwa bagi orang kaya inflasi dapat dibendung dan menurun, sementara bagi orang mis-

kin terus menerus meningkat ini berarti bahwa ketidakadilan sosial terus meningkat di kalangan masyarakat. Ini adalah sikon yang di hadapi masyarakat dewasa ini yang hanya bisa diatasi dengan suatu pembangunan masyarakat desa yang bisa dimulai dengan infrastruktur pedesaan dan pembangunan sektor pertanian serta komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka ke depan kita berhadapan dengan masalah-masalah inflasi, masalah bantuan kepada UKM melalui koperasi mereka, masalah pemberantasan pengangguran dan kemiskinan, masalah korupsi dan masalah keadilan sosial. Semua masalah yang sebelumnya dikemukakan dapat diatasi jika kita dapat mengatasi masalah korupsi dan keadilan sosial.

Generasi tahun 1928 telah memberikan kebangsaan yang religius dan plural itu. Generasi 1945 telah memberikan kemerdekaan pada bangsa dan negara seperti yang diproklamirkan itu. Maka adalah kewajiban dari generasi sekarang ini untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dan kesejahteraan rakyat yang luas. Hanya mereka dirintangi oleh korupsi dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Maka kewajiban dari generasi

sekarang untuk mengakhiri korupsi dan ketidakadilan sosial itu dan untuk ini diperlukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum bukan negara orang bisa mencari uang seenak dan semaunya.

II. Keuangan Dan Otonomi :

Tadi secara panjang lebar telah dikemukakan masalah keuangan negara dan otonomi daerah. Dan pengertian otonomi harus kita perluaskan karena uang adalah satu-satunya alat produksi yang mempunyai nilai/harga tersendiri. Tadi telah dikemukakan komplikasi dari hal bahwa uang mempunyai nilai harga tersendiri itu, bahwa uang mempunyai harga tersendiri itu dapat dibuktikan dengan adanya pasar uang dan pasar modal di Bursa. Karena uang mempunyai nilai otonomi maka ia pun dapat lari keluar dari satu negara dan meringjang negara yang lain maka timbulah krisis keuangan seperti yang terjadi di tahun 1997 di negara kita. Dewasa ini timbul perdebatan antara para ahli, apakah kita akan mengalami krisis moneter kedua seperti di tahun 1997 itu atau tidak.

Menurut saya selama uang mempu-

nyai nilai tersendiri di pasar uang dan pasar modal maka krisis moneter itu dapat terjadi lagi, terlepas dari kondisi fundamental ekonomi lainnya. Tuan Irwing Ficher memformulasikan nilai-nilai/harga mata uang dengan formula aljabar sebagai berikut :

MV sama dengan PT , P sama dengan MV bagi T artinya Nilai/harga uang sama dengan jumlah uang kali pemin-dahan uang dari tangan ke tangan di-bagi dengan barang yang dapat di beli dengan nilai uang tersebut dalam jang-ka waktu tertentu yaitu 12 bulan.

Komplikasi yang timbul mengenai uang (*economy monoter*) bukan saja karena uang mempunyai nilai oto-nomi seperti yang diuraikan di atas, tetapi uang juga dikelola secara oto-nomi oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang terakhir me-nge-nai Bank Indonesia. Sebab itu (jika saudara melihat uang Rp 50 ribu dan atau Rp 100 ribu yang merah) dewasa ini maka di situ tidak lagi disebut Oeang Republik Indonesia te-tapi uang Bank Indonesia. Saya pun sangat setuju bahwa uang dikelola tersendiri secara otonomi oleh Bank Indonesia, namun tidak sejauh dan secepat seperti dewasa ini terjadi di Republik ini. Ketika saya menjadi

Menteri Keuangan dahulu di awal orde baru, saya pun ingin bahwa uang dikelola oleh Bank Indonesia secara otonomi tetapi Bank Indonesia se-bagai lembaga otonomi di lingkung-an pemerintahan bukan Bank Indo-nesia sebagai lembaga tersendiri ber-dasarkan Undang-undang yang kita ambil oper dari luar negeri.

Bank Indonesia dewasa ini adalah lembaga otonomi berdasarkan un-dang-undang yang diambil oper dari Jerman Barat di bawah pemerintah-an Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Walaupun saya pada waktu itu ada-lah penasihat ekonom Presiden Ha-bibie, namun undang-undang Bank Indonesia telah dibuat sebelum saya dipilih sebagai penasihat ekonom dari Presiden Habibie. Terlalu jauh dan cepatnya kita mengambil oper posisi otonami dari Bank Indonesia seperti dalam undang-undang Bank Central di negara barat, itu merupakan pula salah satu komplikasi yang kita ha-dapi dewasa ini. Kita mengambil oper undang-undang dari Jerman Barat tanpa disiplin dan ekonomi orang Jerman. Inilah merupakan salah satu sumber komplikasi yang kita hadapi dewasa ini. Jadi keinginan saya ada-lah kembalikan Bank Indonesia pada posisi sebagai lembaga otonom di

kalangan pemerintahan Republik dan atau membentuk badan semacam Dewan Moneter untuk mengatasi ketegangan yang ada antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam pelaksanaan / *policy* stabilitas moneter itu. Sekarang dengan tugas yang lebih jelas dan lebih mementu. Pada awal orde baru juga ada Dewan Moneter yang saya bentuk dan sekretaris dari Dewan Moneter itu adalah saudara J.B. Sumarlin yang akhirnya menjadi Menteri Keuangan yang menggantikan saya.

Hanya pada waktu itu Dewan moneter itu sebagai lembaga yang baru tidak tahu persis apa yang harus dia perbuat dan hampir saja tidak ada ketegangan antara Menteri Keuang-

an dan Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu (antara saya dan saudara Radius Prawiro).

Jadi diperlukan pembentukan sebuah dewan moneter untuk mengatasi ketegangan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia juga dalam melaksanakan politik pemerintah untuk membantu UKM-UKM dengan bunga yang rendah. Dalam hal ini dapat timbul beda persepsi antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Ini berbahaya bagi kebijaksanaan pemerintah karena Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengawasi semua bank-bank di Indonesia dan memiliki kewenangan pula untuk menciptakan uang sebagai *lander of last resort*. □

